

## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Alasan Pemilihan Judul

##### 1.1.1 Aktualitas

Permasalahan stunting menjadi isu yang hangat dibicarakan, baik di tingkat global, nasional, dan bahkan hingga ke pelosok negeri. Pada tataran global, WHO di tahun 2012 telah menyusun implementasi komprehensif tentang gizi ibu, bayi, dan anak kecil yang memuat 6 target nutrisi global yang ingin dicapai pada 2025. Target pertamanya adalah mengurangi 40 persen jumlah anak dibawah 5 tahun yang mengalami stunting (WHO, 2014). Ada beberapa faktor yang mengakibatkan meningkatnya perhatian dunia internasional mengenai stunting sebagai permasalahan global. Pertama, besarnya jumlah anak yang mengalami stunting secara global dimana diperkirakan ada 162 juta anak dibawah umur 5 tahun yang menderita stunting (WHO, 2015). Kedua, konsekuensi kesehatan yang harus diemban jangka pendek dan jangka panjang, termasuk diantaranya rendahnya pengakuan dan performa pendidikan, upah kerja yang rendah, dan hilangnya produktivitas. Ketiga, perlunya kesepakatan bersama untuk mendefinisikan pertumbuhan manusia secara normal yang dapat diterapkan dimanapun. Keempat, anggapan bahwa stunting merupakan masalah lintas sektoral sehingga diperlukan kolaborasi lintas sektoral pula (de Onis dan Branca, 2016)

Di Indonesia, angka stunting yang melebihi batas yang ditetapkan oleh WHO membuat Indonesia terancam gagal menikmati Bonus Demografi pada tahun 2030. Dilansir dari situs [stunting.go.id](http://stunting.go.id), penduduk usia produktif yang mencapai 60 persen dari total populasi Indonesia diharapkan menjadikan Indonesia menjadi sebagai negara dengan ekonomi terbesar ke-7 di dunia. Namun, apabila kasus stunting tidak ditangani secara komprehensif, besarnya penduduk usia produktif ini pada akhirnya akan menghasilkan beban demografi.

Prevalensi stunting di Kepulauan Meranti mencapai 23,3 persen, melebihi prevalensi stunting di provinsi Riau yang berkisar di angka 22,3 persen (Studi Status Gizi Indonesia 2021). Tingginya prevalensi stunting ini mempunyai dampak yang serius terhadap berbagai sektor kehidupan, khususnya di Kepulauan Meranti. Isu stunting di kabupaten Meranti juga mendapat

perhatian serius dari PT. RAPP yang beroperasi di kabupaten termuda di provinsi Riau ini. Dilansir dari Riau .go.id , PT RAPP sebagai bagian dari APRIL Group dan Tanoto Foundation mendukung upaya pemerintah melalui berbagai program. Lebih lanjut, Bertone Anwar sebagai Community Development (CD) Strategic Manager RAPP berkomitmen berkolaborasi dengan pemerintah provinsi Riau mengurangi prevalensi stunting hingga 50 persen di Riau. Komitmen ini bahkan dimasukkan kedalam agenda APRIL 2030. Dampak kesehatan dan ekonomi yang ditimbulkan oleh stunting, pada akhirnya membuat seluruh stakeholder melihat stunting sebagai isu prioritas untuk diatasi.

### **1.1.2 Relevansi dengan Studi PSdK**

Departemen Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan merupakan jurusan yang mengkaji mengenai usaha-usaha menyejahterakan masyarakat dengan menggunakan pendekatan 3 aktor, yaitu pemerintah, LSM, dan perusahaan. Upaya menyejahterakan masyarakat tersebut bertujuan untuk mengatasi permasalahan sosial ataupun penyakit sosial. Studi Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan sendiri memiliki 3 konsentrasi yaitu, pembangunan masyarakat (*community development*), kebijakan sosial (*social policy*), dan CSR (Corporate Social Responsibility). Sebagai salah satu konsentrasi dalam studi PSdK, CSR memiliki andil yang cukup penting dalam mengurai permasalahan ketidakberdayaan masyarakat khususnya yang tinggal di sekitar operasional perusahaan. Ketidakberdayaan tersebut bisa berupa lemahnya kemandirian masyarakat sebagai produk dari kemiskinan struktural yang dihadapi oleh mereka. Stunting yang berasal dari gizi ibu hamil yang tidak tercukupi dan kurangnya asupan nutrisi pada anak selama 1000 Hari Pertama Kehidupan memiliki kaitan yang erat dengan perekonomian keluarga yang berada dibawah garis kemiskinan dan tingkat pendidikan orangtua yang rendah. Penelitian Rio Sundari, dkk pada tahun 2021 menunjukkan tingkat kesejahteraan yang relatif rendah di Kabupaten Kepulauan Meranti sebagai akibat dari ketertinggalan ekonomi yang disebabkan oleh faktor internal maupun eksternal komunitas. Ada korelasi positif antara pertumbuhan stunting yang terjadi pada anak dan ekonomi keluarga yang rentan, dimana keluarga miskin kesulitan dalam mencukupi kebutuhan gizi bagi anak mereka (Paudel dalam Hendrayati & Asbar, 2018).

Stunting yang tidak hanya berdampak pada tumbuh kembang anak, namun juga berpengaruh pada sektor kehidupan lainnya menjadikan studi PSdK sangat relevan dalam

menjawab permasalahan ini. Melalui pendekatan aktor perusahaan dalam mendukung program percepatan penurunan stunting, penelitian ini berupaya untuk menunjukkan proses pengimplementasian program dan keterkaitannya dengan isu kesejahteraan sosial.

### 1.1.3 Orisinalitas

Orisinalitas menjadi bagian yang penting dalam proses melakukan riset. Riset yang tidak memperhatikan aspek orisinalitas, tentu saja melanggar etika di dunia pendidikan dan tidak memenuhi persyaratan akademis. Upaya menjaga orisinalitas penelitian dilakukan sebaik mungkin sehingga penelitian terhindar dari plagiarisme. Ada berbagai macam penelitian yang mengangkat topik tentang implementasi program CSR di perusahaan, namun penelitian yang membahas tentang implementasi program penanganan stunting oleh perusahaan merupakan riset yang relatif baru untuk diteliti. Sebagai perusahaan yang bergerak di industri kertas, komitmen PT RAPP dalam mendukung isu-isu nasional seperti stunting merupakan hal yang belum banyak dilakukan oleh perusahaan lainnya. Meskipun isu stunting tidak berkaitan langsung dengan operasional mereka yang terfokus pada industri produksi dan pengolahan kertas. Namun, PT RAPP melakukan inisiasi untuk terlibat dalam upaya penanganan stunting lewat program CSR yang mereka implementasikan. Oleh karena itu, unsur orisinalitas penelitian ini sudah terpenuhi. Berikut tabel yang menyajikan beberapa penelitian yang serupa mengenai implementasi program CSR PT. RAPP :

Tabel 1.1 Penelitian Serupa Mengenai Implementasi Program CSR

No	Peneliti	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1	Yogi Setiawan	Evaluasi Pelaksanaan Corporate Social Responsibility (CSR) PT RAPP Kecamatan Pangkalan Kerinci,	Kualitatif	Hasil dari penelitian ini yaitu evaluasi pelaksanaan CSR sudah berjalan dengan baik melalui sinergi dalam mendukung program pembangunan pemerintah. Penelitian ini menggunakan 4 indikator dalam mengevaluasi program CSR yang dijalankan. Indikator tanggungjawab ekonomi, CSR telah terbukti berdampak terhadap perekonomian

		Kabupaten Pelalawan		<p>masyarakat melalui pemberian lapangan kerja dan bantuan ekonomi. Indikator tanggungjawab hukum , perusahaan telah mematuhi regulasi yang ada.</p> <p>Indikator tanggungjawab diskresi, perusahaan telah berusaha menjalin interaksi dengan stakeholder secara baik. Pada tanggungjawab etis menunjukkan perusahaan belum menjunjung kebudayaan dan kearifan lokal secara serius.</p> <p>Hasil lainnya menunjukkan bahwa penghambat pelaksanaan CSR adalah kurangnya partisipasi masyarakat dan pemerintah, serta sanksi yang belum jelas apabila perusahaan tidak menerapkan CSR secara baik.</p>
2	Khusnul Fatimah	Program Baja Lanting sebagai Upaya Penanganan Stunting oleh PT Perusahaan Gas Negara SOR II- Stasiun Cimanggis	Kualitatif	<p>Program terimplementasikan dengan cukup baik dan program berjalan lancar, dimana masyarakat dan pemerintah desa menyambut program dengan antusias. Adapun kunci kesuksesan program ini disebabkan oleh kolaborasi antar stakeholder yang berjalan baik. Keterlibatan pihak perusahaan, tenaga kesehatan dan PKK membuahkan hasil yang baik dalam mencapai keberhasilan program.</p>
3	Desri Fitriani	Strategi Humas PT. Riau Andalan Pulp and Paper dalam Pelaksanaan Program Corporate Social Responsibility (CSR) Kepada	Kualitatif	<p>Penelitian tersebut menunjukkan bahwa perusahaan (PT RAPP) telah berhasil melaksanakan program CSR kepada masyarakat Kelurahan Kerinci Barat di tahun 2018. Tahapan program yang dilaksanakan, dimulai dari tahapan pengumpulan data, tahapan merumuskan masalah, tahapan perencanaan dan penyusunan program, tahapan strategi komunikasi program dan aksi, serta diakhiri dengan tahapan</p>

		Masyarakat Kelurahan Kerinci Barat Kabupaten Pelalawan Tahun 2018		evaluasi. Kelima tahapan ini telah dilaksanakan secara baik.
4	Najmah Zahiroh, Susi Susanti, Rizka Maulidia, Sofia Maulidia, Inayatul Maula	Program Pemberdayaan Wisata Kampung Batik di desa Ngabab, Kabupaten Malang Melalui Pendekatan CIPOO	Kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa program pemberdayaan wisata kampung batik di desa Ngabab telah berhasil memberikan dampak yang positif pada masyarakat setempat. Program ini berhasil memberikan kesadaran masyarakat mengenai potensi wisata kampung batik , meningkatkan keterampilan dan pengetahuan dalam industri batik serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ikut serta didalamnya. Implementasi program ini melibatkan berbagai pihak seperti masyarakat, pemerintah daerah dan korporasi.

Sumber : Olah Data Peneliti

Penelitian-penelitian diatas membahas mengenai implementasi dan strategi humas dalam program CSR, dimana ada 2 penelitian yang membahas mengenai kontribusi PT. RAPP dalam melaksanakan program CSR di wilayah Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan dan 1 penelitian lainnya membahas mengenai implementasi program Baja Lanting sebagai upaya mempercepat penurunan stunting oleh PT Perusahaan Gas Negara SOR II-Stasiun Cimanggis. Sementara itu penelitian yang dilakukan oleh Zahiroh, dkk mengkaji implementasi program pemberdayaan wisata di Desa Ngabab, Kabupaten Malang dengan menggunakan pendekatan CIPOO (Context, Input, Process, Output, Outcome). Pendekatan CIPOO digunakan sebagai kerangka kerja untuk menganalisis dan melihat pelaksanaan program pemberdayaan wisata kampung batik di desa tersebut.

## 1.2 Latar Belakang

Eksplorasi studi tentang *Corporate Social Responsibility* (CSR) atau Tanggung Jawab Sosial Perusahaan baru-baru ini telah difokuskan ke arah yang lebih makro, tidak terbatas pada hubungan antara perusahaan dan eksternalitas di area produksi. Sehubungan dengan hal tersebut, skripsi ini meneliti kontribusi CSR dalam penanganan isu stunting, masalah kesehatan nasional yang masih perlu mendapat perhatian serius, dengan mengambil studi kasus dari PT RAPP di Desa Lukit, Kecamatan Merbau, Kabupaten Kepulauan Meranti.

Desa Lukit merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Merbau, Kabupaten Kepulauan Meranti. Desa ini memiliki penduduk sebanyak 2073 penduduk dan menjadi salah satu desa dengan populasi penduduk terbanyak ke 3 di Kecamatan Merbau, setelah Teluk Belitung dan Bagan Melibur. Wilayahnya juga sangat luas yang mencakup areal seluas 205 kilometer persegi (km<sup>2</sup>) atau 20.500 hektar, sehingga menjadikannya sebagai salah satu desa terluas di kabupaten Kepulauan Meranti (BPS Kepulauan Meranti, 2022). Wilayah desa Lukit didominasi oleh kawasan hutan alami dan hutan industri milik PT RAPP, perusahaan yang bergerak di industri kertas. Selain perkebunan kertas, di desa Lukit juga terdapat pengeboran minyak lepas pantai milik PT Energi Mega Persada (EMP) yang telah beroperasi puluhan tahun disana. Meskipun memiliki potensi alam yang kaya, desa Lukit menghadapi berbagai permasalahan dalam aspek kesehatan masyarakat. Salah satu permasalahan yang dihadapi masyarakat di desa Lukit adalah tingginya kasus stunting dan kekurangan gizi yang diderita oleh anak-anak.

Stunting merupakan kondisi dimana anak gagal untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik kondisi fisik maupun kecerdasannya sebagai akibat dari kondisi kekurangan gizi kronis dan serangan infeksi yang berulang selama 1000 hari pertama kehidupan anak. Seorang anak dikatakan stunting apabila ia memiliki tinggi atau panjang badan kurang dari 2 standar median pertumbuhan anak menurut standar WHO (WHO, 2015). Periode 1000 Hari Pertama Kehidupan atau HPK merupakan fase krusial dalam tumbuh kembang manusia dan menjadi faktor penentu dalam proses terjadinya stunting. Pada kasus anak yang menderita kekurangan gizi kronis selama 1000 HPK-nya, maka akan berdampak pada kualitas hidupnya seumur hidup.

Akibatnya akan berdampak pada timbulnya risiko penyakit tidak menular pada saat usia dewasa, kecerdasan anak menjadi minim dan kerdilnya tinggi badan (Bhutta, 2008).

Meskipun seorang anak telah melewati periode 1000 Hari Pertama Kehidupan, upaya intervensi terhadap stunting masih harus terus dilakukan. Stunting yang terus berkembang hingga menginjak remaja akan berdampak pada kerdilnya tinggi badan anak. Riset yang dilakukan oleh Aryastami (2015) menemukan hasil bahwa anak yang berumur 0-2 tahun dan 4-6 tahun dengan pertumbuhan tinggi badan yang relatif pendek, akan tetap memiliki badan yang pendek sebelum memasuki usia pubertas dengan risiko sebesar 27 kali lebih besar. Sementara itu, pada anak usia 4 hingga 5 tahun yang memiliki tinggi badan normal menghadapi kemungkinan 14 kali lebih besar mengalami stunting sebelum pubertas.

Seringkali, kondisi stunting tidak dikenali oleh sebagian besar masyarakat, dikarenakan anak dengan perawakan pendek, normal ditemukan karena adanya anggapan bahwa tinggi badan anak sepenuhnya dipengaruhi oleh faktor genetik orangtua. Studi de Onis pada 2016 menjelaskan adanya kesulitan untuk mengidentifikasi stunting secara kasat mata dan kurangnya pemeriksaan pertumbuhan linear secara rutin di fasilitas kesehatan dasar menjadi penyebab mengapa perlu waktu yang lama untuk menyadari betapa berbahayanya permasalahan ini. Namun, baru-baru ini dunia telah melihat bahwa isu stunting merupakan permasalahan kesehatan global yang paling serius. Terbukti pada tahun 2012, Resolusi Majelis Kesehatan Dunia mengadopsi rencana implementasi komprehensif yang diperuntukkan kepada ibu hamil, bayi, dan anak kecil, yang mencakup 6 target nutrisi global pada tahun 2025. Salah satu kebijakan didalamnya adalah upaya global untuk menurunkan prevalensi stunting pada balita di tahun 2015 hingga sebesar 40 persen dan menghapus malnutrisi pada tahun 2030 (WHO, 2014).

Untuk melihat sebaran stunting di Indonesia, peneliti menggunakan Hasil Studi Status Gizi Indonesia tingkat Nasional, Provinsi, dan Kabupaten/Kota tahun 2022 sebagai acuan data. Hasil survei tersebut menunjukkan posisi Indonesia sebagai negara dengan beban anak stunting tertinggi ke-2 di Asia Tenggara dan ke-5 di dunia. Lebih lanjut, SSGI menunjukkan prevalensi stunting berada di angka 21,6 persen. Ini berarti 1 dari 5 anak di Indonesia mengalami stunting. Angka ini memang turun sebesar 2,8 persen jika dibandingkan pada tahun 2021. Namun, perlu lebih banyak intervensi untuk menurunkan prevalensi stunting sesuai dengan target pemerintah



pada tahun 2024 menjadi 14 persen. Target pemerintah tersebut tertuang dalam RPJMN 2020-2024 (Perpres Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN Tahun 2020). Negara harus bekerja ekstra menurunkan prevalensi stunting dan tugas ini tentu saja membutuhkan kolaborasi lintas sektoral. Kehadiran pemerintah saja tidak cukup dalam menurunkan kasus stunting, perlu ada partisipasi pihak swasta melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) sehingga target pemerintah bisa tercapai. Keterlibatan pihak lain, salah satunya oleh perusahaan merupakan manifestasi dari model pluralisme kesejahteraan yang dikemukakan oleh Midgley, dimana model ini menjadi jawaban dalam mengatasi permasalahan stunting dikarenakan setiap *stakeholder* memiliki tanggung jawab yang setara untuk melakukan pelayanan sosial kepada masyarakat sebagai penerima pelayanan (Midgley dalam Sumarto, 2007). Sektor swasta perlu menyelaraskan program CSR yang mereka miliki dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Perusahaan diharapkan bisa mengisi ruang melalui CSR yang difokuskan pada penanganan stunting, khususnya di wilayah sekitar perusahaan beroperasi (Kemensetneg, 2022).

CSR memiliki definisi berupa komitmen korporasi untuk melakukan praktik ekonomi yang berkelanjutan dengan memfokuskan diri pada upaya tanggung jawab sosial perusahaan serta memperhatikan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan secara seimbang di wilayah tempat perusahaan itu beroperasi (Untung dalam Iskandar, 2018). Sementara itu, Winarni (2012) berpendapat bahwasanya CSR merupakan bentuk kedermawanan perusahaan untuk berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi dan pembangunan secara berkelanjutan. Lebih lanjut, CSR merupakan kesadaran dan kepedulian perusahaan untuk meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat di sekitar wilayah operasional perusahaan melalui interaksi dan aktivitas bisnis dengan stakeholder terkait.

Dalam konteks Indonesia, peraturan mengenai bagaimana CSR perusahaan diimplementasikan, sudah diatur dalam beberapa produk hukum, yaitu dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, dan Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor Per-5/MBU/2007 tentang Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan, khusus untuk perusahaan-perusahaan BUMN. Implementasi CSR terhadap aspek lingkungan dan sosial juga diatur dalam UU Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Pasal 74 berikut :



1. Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.
2. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.
3. Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketentuan lebih lanjut mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Berdasarkan keterangan diatas dapat dipahami bahwa adanya kewajiban tiap perusahaan untuk melaksanakan program Corporate Social Responsibility (CSR) atau yang juga dikenal dengan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL), termasuk didalamnya penyediaan anggaran dan pelaporan hasil program CSR/TJSL tersebut. Apabila perusahaan tidak melaksanakan praktik TJSL secara patut dan wajar, maka akan diberlakukan sanksi yang disesuaikan dengan peraturan pemerintah lain terkait (Arifudin, 2008). Adanya regulasi ini membuat keberadaan CSR tidak hanya sebatas kewajiban moral bagi perusahaan, tapi berubah menjadi kewajiban hukum.

Salah satu korporasi yang fokus pada pencegahan stunting sebagai bagian dari program CSR adalah PT Riau Andalan *Pulp & Paper*, selanjutnya disingkat menjadi PT. RAPP. Perusahaan ini merupakan anak perusahaan dari *Asia Pacific Resources International Holding Limited (APRIL)*, sebuah grup bisnis yang bergerak pada industri manufaktur pengolahan serat terbarukan dan menjadi salah satu dari 5 perusahaan penghasil bubur kertas (pulp) dan kertas terefisien di dunia. PT RAPP yang merupakan perusahaan multinasional memiliki 5 prinsip dalam menjalankan praktik CSR yaitu : *Good for Costumer, Good for Community, and Good for Company, Good for Country*, dan *Good for Climate*. Kelima prinsip tersebut mengindikasikan bahwa dalam mempraktikkan CSR yang berkelanjutan, RAPP selalu memperhatikan berbagai aspek, mulai dari konsumen, perusahaan, komunitas lokal, negara, dan ekosistem (Fitriana, 2018).

Operasional pabrik pulp dan kertas serta perkebunannya sebagian besar berada di Kabupaten Pelalawan, tepatnya di sekitar Pangkalan Kerinci. Selain lokasi pabrik yang berada di Provinsi Riau, PT RAPP mempunyai kantor pusat yang terletak Jakarta Pusat, DKI Jakarta. Wilayah konsesi HTI perusahaan ini tersebar di berbagai kabupaten di provinsi Riau, salah satunya Estate Pulau Padang yang wilayahnya terbagi menjadi dua kecamatan yaitu kecamatan Merbau dan Tasik Putri Puyu. Secara administratif, kedua kecamatan ini masuk ke dalam kabupaten Kepulauan Meranti.

Dilansir dari situs halloriau.com, PT RAPP memiliki dua pendekatan yang digunakan untuk mendukung percepatan penurunan stunting di Provinsi Riau (khususnya di Kepulauan Meranti) yaitu *Community Empowerment* dan *Enabling Environment*. Pendekatan pertama adalah dengan melakukan proses pemberdayaan masyarakat (*community empowerment*) yang bertujuan untuk meningkatkan intervensi spesifik dan intervensi sensitif di masyarakat. Adapun kegiatan yang dilakukan diantaranya memberikan pendampingan kepada kader posyandu berupa pelatihan penyelenggaraan kader posyandu, monitoring dan evaluasi petugas posyandu, pemberian peralatan posyandu dan kompetisi bagi Posyandu. Selain itu, tenaga kesehatan lainnya diberikan peningkatan kompetensi melalui pelatihan Pelayanan Kesehatan Berbasis Masyarakat (PKBM), pelatihan Manajemen Terpadu Balita Sakit Berbasis Masyarakat (MTBS-M), Training of Trainer Konseling PMBA (Pemberian Makan Bayi dan Anak) kepada petugas gizi Puskesmas dan pelatihan kebersihan sanitasi yang ditujukan ke berbagai stakeholder. PT RAPP juga melaksanakan program Pemberian Makanan Tambahan (PMT) yang ditujukan kepada anak balita gizi buruk, bawah garis merah (BGM), dan ibu hamil dengan kekurangan gizi kronis. Aksi promosi dan edukasi kesehatan juga diberikan melalui kampanye kesehatan dan media KIE (Komunikasi, Informasi, dan Edukasi)

Adapun intervensi kedua dilaksanakan melalui pembentukan lingkungan yang mendukung pencegahan stunting (*enabling environment*) dengan cara memasukkan pilar ke-2 dan ke-3 strategi nasional penanganan stunting dalam program CSR-nya yaitu pendampingan teknis komunikasi perubahan perilaku dan pendampingan aksi konvergensi. Intervensi lainnya dilakukan dengan cara memobilisasi tim PKK, meningkatkan pendeteksian risiko kehamilan, serta program pelaksanaan Rumah Anak Sigap.

Intervensi yang dilakukan oleh PT RAPP dalam menangani isu stunting cukup beragam, seperti yang telah disebutkan diatas, mulai dari pemberdayaan masyarakat, peningkatan kapasitas petugas posyandu , hingga bantuan pemberian bahan makanan tambahan yang bersifat karitatif. Melihat beragamnya intervensi yang diberikan, tentu aspek implementasi suatu program menjadi penting dan mendesak untuk diteliti dikarenakan implementasi program merupakan langkah awal yang krusial dalam menjalankan CSR. Tanpa adanya pemahaman yang komprehensif tentang bagaimana program ini dijalankan, diawasi, dan dikelola, akan lebih sulit untuk menilai sejauh mana program tersebut berhasil mencapai tujuan dan dampak yang diharapkan. Dengan demikian, informasi yang dikumpulkan seperti bagaimana lingkungan memengaruhi jumlah kejadian stunting, proses pelaksanaan program, dan faktor-faktor yang menjadi mendukung atau menghambat pelaksanaan program akan menjadi sangat bermanfaat dalam menyusun perbaikan atau peningkatan efektivitas program nantinya.

Disamping itu, penelitian mengenai implementasi CSR dengan menggunakan pendekatan CIPOO (Context, Input, Process, Output, Outcome) masih jarang dilakukan dalam ranah akademis. Meskipun CIPOO merupakan pendekatan yang cukup relevan dalam memahami bagaimana implementasi pelaksanaan program CSR, namun hanya sedikit penelitian yang mengadopsi kerangka kerja ini. Beberapa penelitian lebih fokus kepada hasil akhir dari program CSR, alih-alih mengeksplorasi faktor-faktor kontekstual, masukan, dan proses pelaksanaan program CSR yang memiliki kontribusi signifikan terhadap hasil program tersebut.

### **1.3 Rumusan Masalah**

Rumusan masalah adalah pertanyaan ataupun pernyataan yang hendak dijawab oleh peneliti didalam sebuah tulisan. Adanya rumusan masalah memudahkan peneliti untuk menjawab dan membahas hal-hal yang menjadi fokus penelitian. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

Bagaimana implementasi program CSR PT RAPP dalam penanganan stunting di desa Lukit ?

## **1.4 Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian disusun agar peneliti memiliki batasan yang jelas dalam membahas topik penelitian yang diangkat. Berdasarkan rumusan masalah dan latar belakang yang telah disusun, adapun tujuan dari penelitian adalah untuk menjelaskan implementasi program CSR PT RAPP di desa Lukit. Adanya penelitian yang mendeskripsikan implementasi CSR ini bertujuan agar perusahaan mampu mengevaluasi program-program CSR PT. RAPP dan meningkatkan kinerja sosial perusahaan dimasa mendatang.

## **1.5 Manfaat Penelitian**

1. Penelitian ini diharapkan menjadi referensi bagi penelitian lainnya yang membahas implementasi program CSR, khususnya yang berfokus pada program pencegahan dan penurunan stunting
2. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi pimpinan perusahaan dalam merumuskan kebijakan terkait dengan proses evaluasi program CSR.

## **1.6 Kerangka Teori**

### **1.6.1 CSR**

#### **a. Sejarah dan Perkembangan CSR**

Sejarah dan perkembangan CSR tidak bisa dilepaskan oleh adanya pemikiran Milton Friedman, seorang ekonom dan pemenang hadiah Nobel dalam ekonomi yang memiliki pandangan kritis terhadap konsep CSR (Corporate Social Responsibility). Menurutny, perusahaan hanya perlu meningkatkan keuntungan pemegang sahamnya dan aktivitas diluar itu hanya dianggap akan mengganggu operasionalnya. Friedman juga berkeyakinan bahwa dengan beroperasinya sebuah perusahaan sudah bisa dikategorikan sebagai bentuk CSR. Karena dengan adanya perusahaan tersebut, maka akan secara otomatis, berdampak pada munculnya kebutuhan lapangan pekerjaan dan peningkatan ekonomi di sebuah negara (Yuda, 2016). Friedman berargumen bahwa perusahaan memiliki tanggung jawab sosial terhadap etika dalam menjalankan bisnisnya. Namun, disaat yang sama, beliau menantang wacana mengenai perusahaan harus turut serta dalam menyelesaikan permasalahan sosial di masyarakat.

Kenyataannya, perspektif ini dinilai sebagian kalangan sudah tidak relevan dengan perkembangan zaman, dimana perusahaan-perusahaan melakukan eksploitasi berlebihan yang menurunkan kualitas ekologis hingga skala global. Tak hanya itu, pengambilan sumber daya alam yang berlebihan ini berdampak pada munculnya berbagai konflik sosial di masyarakat akar rumput (Santoso dalam Yuda, 2016). Wacana tersebut akhirnya semakin tergantikan oleh konsep yang lebih luas dan lebih mudah diterima oleh masyarakat.

Dimasa modern, diskursus mengenai CSR dilanjutkan oleh perspektif dari ekonom berkebangsaan Amerika Serikat, Howard R. Bowen dalam bukunya yang berjudul *Responsibility of the Businessman* pada tahun 1953 (Harper and Row dalam Syahputra, 2008). CSR yang dimaksudkan oleh Bowen adalah kewajiban pelaku bisnis untuk melakukan tindakan dan kebijakan yang mengikuti norma yang berlaku dalam suatu masyarakat. Atau dalam kata lain, pelaku bisnis secara umum memiliki tanggung jawab baik secara legal, ekonomi, etis, dan lingkungan terhadap masyarakat sekitar lokasi bisnis tersebut. Bowen menambahkan bahwa dari segi nomenklatur pun pada saat itu belum mengenal istilah CSR, melainkan ada beberapa macam seperti Tanggung Jawab Sosial Pelaku Bisnis (*Social Responsibility of Businessman*), Tanggung Jawab Publik, Obligasi Sosial, hingga Bisnis Moralitas. Secara substantif, beliau lah orang pertama yang mengemukakan konsep tentang tanggung jawab sosial perusahaan dan diakui secara luas oleh akademisi dan publik. Atas jasanya tersebut, beliau dinobatkan sebagai “Bapak CSR” (Susiloadi dan Nurdizal dalam Susetiawan, 2012)

Sejak saat itu, Istilah CSR mendapatkan perluasan makna, orientasi kegiatan CSR yang mulanya hanya seputar “filantropi” , kemudian dimaknai sebagai strategi perusahaan untuk meningkatkan citra/impresi perusahaan yang kemudian mempengaruhi keuangan perusahaan beserta pengembangan masyarakat terhadap program CSR (Sari, 2013). *The World Business Council for Sustainable Development* (Dewan Bisnis Dunia untuk Pembangunan Berkelanjutan) dalam Solihin (2009) menjelaskan bahwa Tanggung Jawab Sosial Perusahaan adalah komitmen dari pengusaha dan bisnis untuk berkontribusi bagi perekonomian secara berkelanjutan, menaikkan kinerja pegawai perusahaan, keluarganya, dan masyarakat lokal yang berada di sekitar areal korporasi. Sementara itu, Hopkins (2003) berpendapat bahwa perusahaan dalam melakukan tanggung jawab sosial harus berkontribusi secara positif agar diterima oleh masyarakat karena nantinya akan berdampak pada meningkatnya standar hidup yang lebih tinggi

baik karyawan perusahaan maupun masyarakat yang tinggal disekitar operasional perusahaan. *The Organization for Economic Cooperation and Development (OECD)* dalam Darmawan (2012) mendefinisikan CSR sebagai wadah bagi perusahaan untuk berkontribusi terhadap upaya pembangunan berkelanjutan serta nilai nilai yang ada di masyarakat. Perhatian perusahaan tidak hanya sebatas kepada kesejahteraan karyawan, kualitas produk yang dihasilkan, ataupun keuntungan bagi *shareholder*, melainkan juga perhatian terhadap *local value* yang melekat. Kotler dan Lee dalam Fitriana (2018) menjelaskan ada 6 kategori aktivitas CSR, yaitu :

1. Mempromosikan kegiatan sosial, yaitu kegiatan mengeskalisasi kegiatan sosial yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai isu sosial yang diangkat dengan cara mengalokasikan dana perusahaan ke dalam program tersebut. Contoh kegiatan lainnya berupa kegiatan penggalangan dana, perekrutan relawan dan juga partisipasi masyarakat dalam aksi sosial.
2. Pemasaran yang relevan dengan kegiatan sosial (*Cause Related Marketing*), perusahaan berkomitmen untuk mengalokasikan keuntungan perusahaan kepada aktivitas sosial yang mereka jalankan.
3. Pemasaran Kemasyarakatan Korporat, kampanye yang dijalankan oleh perusahaan yang bertujuan untuk mengubah *lifestyle* dan perilaku masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kesehatan, upaya keselamatan di masyarakat, melaksanakan kesehatan dan keselamatan publik, konservasi lingkungan, serta upaya menaikkan taraf kesejahteraan masyarakat.
4. Kegiatan Filantropi Perusahaan (*Corporate Philanthropy*), perusahaan melakukan aksi sosial berupa pembagian bingkisan, uang tunai, maupun kegiatan sumbangan lainnya.
5. Pekerja Sosial Kemasyarakatan Sukarela (*Community Volunteering*), perusahaan mendorong karyawannya untuk melakukan aktivitas kerelawanan sebagai bentuk kepedulian terhadap institusi sosial di masyarakat.
6. Praktik bisnis yang memiliki tanggung jawab sosial (*Socially Responsible Business Practice*), perusahaan melakukan aktivitas bisnis melampaui aktivitas bisnis yang diwajibkan oleh peraturan yang berlaku, serta melakukan intervensi yang mendukung kegiatan sosial, kesejahteraan masyarakat, dan lingkungan hidup.

## b. Praktik CSR di Indonesia

Di Indonesia, telah banyak regulasi yang mengatur mengenai bagaimana implementasi program CSR di ranah perusahaan. Selain UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, ada beberapa peraturan terkait bidang sosial dan lingkungan yang mengatur lebih lanjut tentang penerapan CSR, diantaranya :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen , khususnya hak-hak yang harus didapatkan konsumen;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, khususnya terkait hak dasar manusia untuk tinggal di lingkungan yang sehat ;
3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang mengatur pengelolaan dan pemanfaatan hutan;
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mengatur mengenai masalah penyuapan terkait perizinan;
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang mengatur mengenai upah dan kesejahteraan karyawan, serta penggunaan pekerja anak dan hak pekerja wanita; dll

Suratmodjo dan Vanany (2018) menyebutkan penerapan CSR di Indonesia terdiri dari berbagai macam bentuk program, diantaranya (1) *Charity*, program yang dilakukan diantaranya sunatan massal, bantuan sembako, pemberian hewan qurban, dsb; (2) *Infrastructure*, programnya berupa pemberian bantuan untuk pembangunan infrastruktur fisik seperti jalan, jembatan, gedung, dsb; (3) *Capacity Building*, program yang dirancang untuk memberikan peningkatan kapasitas baik individu/masyarakat, kegiatannya berupa pelatihan, lokakarya dan studi banding, dan (4) *Empowerment*, berupa program yang dilaksanakan dan difasilitasi oleh perusahaan secara berkelanjutan yang bertujuan memberikan kemandirian masyarakat berupa pemberdayaan ekonomi. Tingkatan terendah CSR adalah pengembangan masyarakat secara karitatif, sementara yang tertinggi adalah pengembangan masyarakat dengan melakukan program pemberdayaan. Ragam jenis CSR ini nyatanya berdampak pada munculnya kekurangan dan kelebihan program CSR (Kinasih, 2019)



Dalam pengimplementasiannya, CSR tetap saja masih menemukan kendala dan kelemahan. Darmawan (2012) dalam tulisannya yang berjudul Implementasi dan Praktek Pengelolaan CSR menjelaskan ada beberapa kelemahan yang ada dalam pelaksanaan program CSR saat ini. Pertama, internal perusahaan yang mengelola CSR tidak dijadikan sebagai divisi tersendiri dalam perusahaan dan seringkali digabung dalam bagian hubungan masyarakat. Hal ini mengakibatkan tidak terselenggaranya program CSR yang berkelanjutan dan efektif. Kedua, program CSR tidak dirancang secara baik dan mengabaikan apa yang menjadi kebutuhan masyarakat. Hal ini berakibat pada program yang tersusun hanya bersifat reaktif atau menunggu permintaan dari masyarakat, dan pada akhirnya berakibat pada terjadinya ketergantungan masyarakat. Lebih lanjut, Darmawan menjelaskan perlunya penyusunan program yang bersifat jangka panjang dan menjawab kebutuhan masyarakat, khususnya komunitas rentan.

### 1.6.2 Stunting

#### a. Definisi stunting

Stunting adalah kegagalan pertumbuhan linier yang dapat dilihat dari indikator tinggi badan berdasarkan umur atau panjang badan berdasarkan umur mempunyai *z score* dibawah -2 Standar Deviasi yang ditetapkan WHO (Sumartini, 2020). Kegagalan tumbuh atau *failure to thrive* merupakan kondisi yang disebabkan oleh malnutrisi berkepanjangan sejak masa kehamilan hingga berumur 24 bulan. Tahap awal malnutrisi dimulai ketika anak mengalami *wasting* atau berat badan yang kurang, kemudian dilanjutkan ke fase stunting, dimana anak mengalami kondisi kurang pertumbuhan linier (Blum CWCdNJ dalam Sumartini, 2020). Adanya stunting mengindikasikan gangguan pada berbagai organ tubuh, salah satunya otak yang merupakan organ terpenting dalam mendukung berbagai kemampuan intelegensia manusia. Otak yang menjadi pusat syaraf berpengaruh besar terhadap respon anak melakukan aktivitas melihat, mendengar, berpikir, dan bergerak. Pengaruh stunting yang signifikan terhadap kognitif dan prestasi anak berdampak pada produktivitas kerja yang rendah pada anak yang menderita stunting dan pada akhirnya berakibat pada kerugian ekonomi dan meningkatkan populasi miskin disuatu negara (Yadika *et al.*, 2019)

## **b. Studi Status Gizi Indonesia (SSGI)**

Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2022 merupakan instrumen yang digunakan untuk mengetahui besaran masalah status gizi balita di Indonesia, baik balita dengan *stunted*, *wasted*, dan *overweight* di Indonesia, berikut dengan faktor penyebab terjadinya. Publikasi ini dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan RI dan didasari oleh berbagai peraturan, diantaranya :

1. Peraturan Presiden No.18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
2. Surat Set Wapres No B.470/KSNB/SWP/PKM.00/07/2021 tentang pelaksanaan SSGI tahun 2022
3. Surat Bappenas No. 030007/PP.03.02/D.5/T/3/2022 mengenai urgensi pelaksanaan SSGI oleh Kemenkes ;
4. Peraturan Presiden No. 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting;
5. Sebagai dasar penetapan Dana Insentif Daerah (DID) oleh Kementerian Keuangan; Sebagai basis data yang diperlukan oleh berbagai kementerian dan lembaga di tingkat pusat maupun daerah untuk mengevaluasi dan menilai perkembangan intervensi konvergensi baik spesifik maupun sensitif.

Determinan yang digunakan dalam survey ini terdiri dari indikator gizi spesifik dan indikator gizi sensitif. Indikator gizi spesifik terdiri dari pemeriksaan kehamilan (antenatal care); imunisasi dasar rutin dan lengkap; pemberian tablet tambah darah pada remaja putri dan ibu hamil, akses pencarian pengobatan kepada orang sakit; pemberian obat cacingan; dan pemberian PMT kepada balita dan ibu hamil. Adapun indikator gizi sensitif terdiri dari akses sanitasi yang memadai; program jaminan kesehatan; pendidikan anak usia dini; program Keluarga Berencana; jaring pengaman sosial (PKH, BPNT, BLT, dll); rumah sehat; ketahanan pangan keluarga; dan diversifikasi pangan pada balita. Secara umum, hasil survey SSGI 2022 memuat informasi seperti berikut :

1. Hasil SSGI 2022 menunjukkan prevalensi stunting di Indonesia turun menjadi 21,6 % di 2022. Apabila dibandingkan tahun sebelumnya yang berkisar pada 24,2 %, angka ini menunjukkan penurunan sebesar 2,8 persen.

2. Adapun 5 provinsi di Indonesia yang memiliki prevalensi balita stunting (tinggi badan menurut umur) secara berurutan adalah provinsi Nusa Tenggara Timur (35,3 persen), Sulawesi Barat (35 persen), Papua (34,6 persen), Nusa Tenggara Barat (32,7 persen), dan Aceh (31,2 persen).
3. Sementara posisi 5 provinsi prevalensi stunting terendah yaitu DI Yogyakarta (16,4 persen), Kepulauan (15,4 persen), Lampung (15,2 persen), DKI Jakarta (14,8 persen), dan Bali (8 persen).
4. Adapun prevalensi stunting (tinggi badan menurut umur) di Riau sebesar 17 persen, dimana Kabupaten Kepulauan Meranti memiliki persentase sebesar 17,5 persen, lebih tinggi 0,5 persen dari rata-rata provinsi Riau.

### c. Faktor penyebab stunting

Tri Siswati dalam bukunya yang berjudul Stunting (2018) menjelaskan bahwa penyebab terjadinya stunting dipengaruhi oleh berbagai macam faktor yang bisa dilihat melalui konsep *social determinant of health* yang terdiri atas penyebab sosial, lingkungan, dan biologi :

#### 1. Faktor Sosial

##### a. Kebijakan politik makro negara

Melalui konsep *Social Determinants of Health (SDH)* dijelaskan bahwa derajat kesehatan individu tergantung pada bagaimana hierarki sosial dan struktur masyarakat di suatu negara bekerja. Hierarki sosial di level makro mencakup sektor kesehatan, pendidikan, ketenagakerjaan, jaminan sosial, kebijakan politik, ekonomi, dan lain-lain. sementara pada level mikro dipengaruhi oleh *income*, gender, ras, tingkat pendidikan, tingkat ekonomi. Adanya perbedaan kebijakan di level makro inilah yang berdampak pada kesenjangan dalam kehidupan bermasyarakat sehingga memerlukan *political will* dari pemangku kebijakan untuk menjawab permasalahan ini (Marmot, 2005). Kesimpulannya, akses terhadap fasilitas kesehatan, pendidikan, komunikasi, dan transportasi yang timpang di masing-masing wilayah memengaruhi derajat kesehatan penduduk di wilayah tersebut.

b. Ketimpangan ekonomi dan kemiskinan sosial ekonomi

Bagi negara berkembang, kemiskinan masih menjadi isu utama dan menjadi penyebab berbagai permasalahan kehidupan seperti pengangguran, gizi buruk pada anak-anak, kejahatan, dan akses yang sulit terhadap fasilitas kesehatan maupun pendidikan. Stunting dan kemiskinan memiliki hubungan yang erat, dimana data dari WHO pada tahun 2017 menunjukkan negara dengan ekonomi menengah dan miskin berkontribusi besar terhadap jumlah kasus stunting di dunia. Di regional ASEAN, negara seperti Singapura yang memiliki GDP per kapita yang tinggi serta akses terhadap pendidikan dan kesehatan yang memadai, angka stuntingnya cukup rendah (Siswati, 2018).

Penelitian yang dilakukan Mendez dan Adair pada tahun 1999 di Filipina menunjukkan hasil bahwa risiko malnutrisi akan semakin tinggi terjadi apabila anak tersebut berasal dari keluarga miskin yang memiliki keterbatasan terhadap daya beli dan kemampuan untuk membeli bahan makanan berkualitas. Solusi berupa penurunan angka kemiskinan tidak serta merta mengurangi ketimpangan ekonomi antar penduduk. Perlu ada intervensi pembangunan ekonomi dengan memperhatikan masyarakat miskin sebagai objek utama di dalamnya, sehingga bisa mengatasi permasalahan kesehatan penduduk. Intervensi berupa kebijakan ekonomi makro yang berhasil ini pada akhirnya akan meningkatkan kemampuan daya beli rumah tangga sehingga berpengaruh terhadap derajat kesehatan rumah tangga tersebut. Selain itu, seiring dengan tumbuhnya perekonomian nasional, pemerintah bisa mengalihkan dana yang diperuntukkan kepada bantuan kemiskinan kepada program pembangunan infrastruktur yang bertujuan meningkatkan sistem kesehatan menjadi lebih lengkap (Hagey, 2012).

c. Status sosial dan ekonomi orangtua

Pekerjaan, pendidikan, dan status ekonomi membentuk sesuatu yang dikenal dengan status sosial. Kenyataannya, tingkat pendidikan mempunyai hubungan erat dengan derajat kesehatan. Braveman *et al.*, (2011) menjelaskan bahwa dengan memiliki tingkat pendidikan yang lebih tinggi, seseorang mampu

menemukan perawatan medis yang lebih tepat, mendapatkan koneksi sosial yang mendukung untuk berperilaku sehat, dan mencegah mereka untuk melakukan hal-hal yang merugikan kesehatan. Orangtua yang memiliki pekerjaan layak dan pendidikan tinggi ini berpeluang besar mendapatkan informasi dan pengetahuan mengenai gizi yang baik dan pada akhirnya dijadikan sebagai pola asuh dalam berkeluarga (Emamian *et al.*, 2013).

#### d. Struktur keluarga

Struktur keluarga dengan jumlah anak yang banyak mempunyai korelasi positif terhadap risiko terjadinya stunting. Semakin banyak jumlah bayi dan anggota keluarga keluarga yang masih kecil, maka semakin tinggi pula risiko stunting pada keluarga tersebut. Penelitian Hien dan Hoa (2009) di Vietnam menunjukkan bahwa keluarga yang memiliki 3 atau lebih anak berisiko 2,47 kali lebih besar memiliki anak yang stunting dibandingkan keluarga dengan 1 atau 2 anak. Anak yang banyak menandakan “kompetisi” untuk mendapatkan makanan dan kebutuhan lainnya akan lebih tinggi. Faktor lain seperti kualitas hubungan keluarga, kesehatan dan pendidikan ibu juga menjadi penentu dalam perkembangan anak, dimana ibu dengan level pendidikan rendah rentan terpapar dengan pengasuhan anak yang salah (Statham dan Chase dalam Siswati, 2018)

## 2. Faktor Lingkungan

### a. WASH

Salah satu kunci utama untuk mengurangi prevalensi stunting adalah akses air bersih dan sanitasi yang layak. Di berbagai negara berkembang, akses sanitasi dan air bersih yang sulit, berkontribusi besar terhadap prevalensi stunting. Data dari UNICEF pada 2015 mencatat bahwa ada 663 juta populasi dunia yang masih sulit mengakses air bersih, 2,4 miliar populasi yang tidak mampu mengakses fasilitas sanitasi yang memadai (dimana 70 persen diantaranya tinggal di pedesaan), dan hampir 1 miliar penduduk yang mempraktekkan perilaku BABS (buang air besar sembarangan). Sanitasi yang

buruk ini berdampak pada angka morbiditas dan mortalitas pada jutaan anak di seluruh dunia dan diketahui penyebab utama kematian akibat diare pada anak. Lebih lanjut, publikasi tersebut juga menjelaskan sanitasi dan perilaku *hygiene* yang buruk menyebabkan orang miskin “terkungkung” dalam lingkaran setan kesehatan yang buruk, penurunan kualitas lingkungan, malnutrisi, dan hilangnya pendapatan (UNICEF, 2015).

b. Polusi akibat asap rokok

Berdasarkan Riskesdas 2018, perokok laki-laki berusia diatas 15 tahun berjumlah 62,9 persen dari total populasi dan menjadikan Indonesia sebagai negara dengan prevalensi perokok laki-laki tertinggi di dunia (Dinas Kesehatan Jakarta, 2022). Besarnya prevalensi perokok ini tentu juga mempengaruhi semakin besarnya dampak yang dihasilkan dari asap rokok. Anak-anak menjadi pihak yang paling rentan terhadap dampak dari asap rokok yang dihasilkan oleh orang dewasa di rumah. Penelitian Semba dan Kalm dalam Siswati (2018) mengemukakan anak yang berasal dari orangtua perokok memiliki kadar kotinin 5,5 kali lebih banyak dibandingkan dengan anak yang berasal dari orangtua bukan perokok. Apalagi, orangtua dengan ekonomi miskin seringkali memindahkan anggaran rumah tangga yang seharusnya membeli bahan makanan berkualitas digunakan untuk membeli rokok. Hal ini berdampak pada terjadinya kekurangan gizi pada anak-anak. Studi Chiolerio dalam Siswati (2018) juga menemukan data bahwa ibu hamil yang menjadi perokok aktif memiliki risiko besar mengalami keguguran, kematian janin, ketuban pecah lebih dini, bayi prematur, dan BBLR.

c. Geografis tempat tinggal

Letak geografis Indonesia yang beragam berdampak pada aksesibilitas menuju fasilitas kesehatan. Penduduk yang tinggal di pulau-pulau terpencil dan terluar ataupun pedalaman seringkali kesulitan dalam mengakses pelayanan kesehatan yang memadai. Penelitian Srinivasan *et al.*, dalam Siswati (2018) menyebutkan ada lebih dari 40 persen penduduk di Kalimantan Barat, Maluku,

dan Sulawesi Barat yang memerlukan waktu lebih dari 1 jam untuk menuju ke rumah sakit umum. Kondisi lebih baik dirasakan oleh penduduk yang tinggal di perkotaan, dimana mereka mendapatkan akses fasilitas pendidikan, kesehatan, dan rantai pasok makanan yang lebih baik dan lebih dekat dibandingkan penduduk pedesaan. Penelitian lainnya dari Akombi (2017) mencatat bahwa balita yang lahir dan besar di daerah pedesaan memiliki risiko lebih tinggi untuk menderita stunting dibandingkan balita yang tinggal di perkotaan.

### 3. Faktor Biologi

#### a. Jenis kelamin dan usia balita

Beberapa penelitian menyebutkan bahwa balita laki-laki memiliki risiko untuk menderita stunting lebih tinggi dibandingkan balita perempuan. Sementara itu, balita dengan usia lebih dari 2 tahun lebih berisiko tinggi mengalami stunting, namun gangguan pertumbuhan juga bisa terjadi pada bayi sejak dalam kandungan hingga berumur 2 tahun (Ramli *et al.*, 2009). Menurut Sudirman dalam Siswati (2018) kemungkinan anak mengalami stunting pada usia 2-3 tahun semakin meningkat dikarenakan pada usia tersebut, pertumbuhan tiap anak mencapai puncaknya dan juga dikarenakan kurangnya asupan gizi yang cukup.

#### b. Konsumsi dan suplementasi zat gizi mikro

Selama periode 1000 Hari Pertama Kehidupan, yang dimulai sejak pembentukan janin pada saat kehamilan hingga berusia 2 tahun, konsumsi dan suplementasi zat gizi mikro seperti zinc, iodium, vitamin A, ataupun ASI menjadi penting untuk didapatkan balita. Beberapa penelitian menunjukkan adanya hubungan rendahnya konsumsi dan suplementasi gizi mikro terhadap meningkatnya risiko prevalensi stunting. Anak yang berasal dari keluarga yang mengonsumsi terlalu banyak sereal memiliki risiko lebih tinggi untuk terkena stunting dibandingkan keluarga yang mengonsumsi lebih banyak protein hewani dalam makanan mereka (Sari *et al.*, 2010). Kandungan fitat yang tinggi dalam



serealiala berakibat pada kurangnya penyerapan zat gizi yang berguna dalam proses pertumbuhan.

Penelitian lainnya juga mengungkapkan peran ASI yang signifikan terhadap perkembangan anak. Kandungan gizi yang terdapat didalam ASI seperti karbohidrat, vitamin, lemak, mineral, hormon pertumbuhan, protein, enzim, dan imunoglobulin (Riordan dan Wambach dalam Siswati, 2018) memiliki peran penting dalam untuk menunjang tumbuh kembang anak. Pemberian ASI kepada balita juga harus dibarengi dengan waktu dan durasi pemberian ASI dan MP-ASI yang sesuai sehingga memberikan dampak optimal. Menurut Krebs dan Hambidge (2007) intervensi berupa pemberian eksklusif selama 6 bulan pertama dan dilanjutkan dengan pemberian MP-ASI menjadi opsi terbaik dalam mendukung tumbuh kembang balita (Siswati, 2018).

#### c. Penyakit infeksi

Penyakit infeksi seperti diare, ISPA, Cacingan dan TBC yang banyak terjadi di wilayah miskin di negara berkembang menjadi faktor risiko terjadinya stunting. Anak yang mengidap penyakit infeksi sangat mungkin mengalami gangguan penyerapan zat gizi dan menurunnya jumlah asupan makanan sehingga mengganggu pertumbuhan dan status gizi balita (Aridiyah dalam Sumartini, 2022) . Berdasarkan riset yang dilakukan oleh Subroto (2021) di Lampung Tengah pada anak usia 12-19 bulan, menunjukkan adanya hubungan antara penyakit infeksi dengan prevalensi stunting, dimana anak yang pernah menderita penyakit infeksi memiliki risiko 3 kali lebih besar mengalami stunting daripada anak yang tidak mempunyai riwayat penyakit infeksi.

#### d. Dampak stunting

Menurut Dasman (2019) ada 4 dampak utama stunting yang tidak hanya dialami oleh anak tapi juga terhadap kualitas SDM sebuah negara, yaitu sebagai berikut :

##### 1. Melambatnya perkembangan psikomotorik dan kecerdasan kognitif

Papalia dalam Yadika *et al.*, (2019) mendeskripsikan perkembangan kognitif adalah pola perubahan kemampuan psikis yang meliputi kemampuan bahasa, belajar, pemusatan perhatian, kreativitas, dan belajar. Adanya gangguan perkembangan kognitif ini diakibatkan oleh melemahnya fungsi kerja otak sebagai akibat dari kekurangan gizi. Hal ini diperkuat oleh Almatsier yang mengemukakan terjadinya kasus kekurangan gizi berakibat pada kerusakan otak secara permanen. Penelitian yang dilakukan oleh Sutiari dan Wulandari (2011) juga menyimpulkan kekurangan gizi yang terjadi selama 1000 hari pertama kehidupan berakibat pada berkurangnya sel otak sebanyak 15-20 % sehingga ketika mencapai usia dewasa, anak tersebut hanya akan memiliki kualitas otak sebesar 80-85 % dan memicu terjadinya ketidakmatangan organisme biokimia yang ada di dalam otak (Yadika *et al.*, 2019).

Rahmaningrum dalam penelitiannya pada tahun 2017 menemukan hasil berupa, dari 12 orang siswa SMP stunting di Sukoharjo, 11 orang diantaranya memiliki kemampuan kognitif kurang dan hanya 1 orang yang memiliki kemampuan kognitif baik. Selain itu, pada 40 anak yang tidak mengalami stunting, 25 orang diantaranya memiliki kemampuan kognitif yang baik, sementara sisanya kurang. Remaja stunting memiliki risiko 18,33 kali lebih besar memiliki kemampuan kognitif yang kurang apabila dibandingkan mereka yang tidak mengalami stunting. Beberapa hasil penelitian diatas menunjukkan adanya hubungan yang erat antara stunting dengan melambatnya perkembangan psikomotorik dan kecerdasan kognitif.

## 2. Kecerdasan intelektual dibawah rata-rata

Penelitian yang dilakukan oleh Gunawan (2018) dimana terdapat data 232 responden yang diambil, 103 anak diantaranya menderita stunting dan 129 anak tidak stunting menyimpulkan bahwa terdapat hubungan antara stunting dengan prestasi akademik. Chang *et al.*, dalam penelitiannya mengungkapkan anak yang menderita stunting mendapatkan nilai matematika dan literasi lebih rendah daripada anak yang tidak menderita stunting. Sementara Grantham *et al* (2008) melakukan penelitian yang menyimpulkan bahwa ada hubungan yang signifikan antara stunting dengan skor IQ para siswa yang berasal dari negara berkembang.

Berbagai penelitian diatas membuktikan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara kasus stunting terhadap kecerdasan intelektual. Anak yang memiliki kecerdasan intelektual rendah ini akan sulit menguasai ilmu pengetahuan yang diajarkan di sekolah, dikarenakan kapasitas kecerdasannya tidak mampu menganalisis dan memahami pelajaran dengan optimal.

### 3. Rentan menderita penyakit degeneratif

Anak yang menderita stunting rentan mengalami penurunan daya tahan tubuh untuk melawan berbagai penyakit yang sebenarnya dapat dicegah. Penyakit degeneratif seperti diabetes, jantung, ginjal, dan hipertensi merupakan penyakit yang timbul saat dewasa dan terbawa semenjak dari dalam kandungan. Penelitian yang dilakukan oleh Damayanti Rusli Sjarif dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia yang dikutip dalam situs genbest.id menyimpulkan bahwa anak stunting yang memasuki usia sekolah berisiko 20 persen mengidap hipertensi dan 30 persen terkena kolesterol serta berisiko tinggi mengalami obesitas.

### 4. Kualitas SDM menjadi rendah

Anak yang menderita stunting memiliki hubungan yang erat dalam penurunan pendapatan negara di masa depan. Hal ini dikarenakan kecerdasan kognitif yang lebih rendah pada penderita stunting berdampak terhadap menurunnya produktivitas kerja dan berpotensi menghilangnya PDB (Produk Domestik Bruto) hingga 11 persen dan menurunkan pendapatan pekerja dewasa sebesar 20 persen. Stunting juga menyebabkan semakin melebarnya kesenjangan pendapatan sehingga mengurangi 10 persen dari total pendapatan seumur hidup dan melanggengkan kemiskinan antar-generasi (Archda dan Tumangger, 2019).

#### 1.6.3 Implementasi

Dalam Oxford Advance Learner's Dictionary dijelaskan bahwa implementasi berarti *put something into effect* (menerapkan sesuatu yang memberikan dampak). Sementara dalam KBBI, implementasi berarti penerapan. Sementara Subarsono dalam bukunya yang berjudul Analisis Kebijakan Publik menjelaskan beberapa pengertian dari implementasi :

1. Solichin menjelaskan implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu atau pejabat-pejabat, pemerintah ataupun pihak swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan dalam keputusan kebijakan
2. Pressman dan Wildavsky menjelaskan implementasi adalah (implementation as to carry out, accomplish, fulfill, produce, complete) membawa, menyelesaikan, mengisi, menghasilkan, dan melengkapi. Implementasi juga bermakna menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu dan adanya hasil praktis dari sebuah upaya.
3. Subarsono menyatakan bahwasanya implementasi sebagai aktivitas yang berkaitan dengan penyelesaian pekerjaan dengan menggunakan sarana (alat) sehingga mencapai tujuan yang diinginkan.

Dari beberapa definisi diatas, dapat dipahami bahwa implementasi adalah rangkaian proses penerapan ide, konsep dan kebijakan. Implementasi menjadi variabel yang sangat berpengaruh dalam keberhasilan sebuah kebijakan. Dalam implementasi CSR, implementasi menjadi bagian tahapan pelaksanaan program CSR yang melibatkan serangkaian kegiatan, tindakan, dan upaya untuk menerapkan program secara konkret di lapangan.

#### **1.6.4 Model Implementasi CIPOO**

Salah satu pendekatan yang digunakan untuk mengetahui implementasi program pemberdayaan adalah model implementasi CIPOO (Context, Input, Process, Output, Outcome). Kerangka konseptual ini menggunakan dimensi konteks, input, proses, output, dan outcome, sehingga dinilai memberikan pemahaman yang lengkap dan komprehensif dalam mengetahui pengimplementasian program CSR stunting. Sebagai salah satu pendekatan yang memiliki orientasi terhadap peningkatan program, model implementasi CIPOO dinilai bisa diterapkan pada program yang belum dan/atau sedang berlangsung serta ditujukan kepada pihak-pihak yang menjadi perancang dan pelaksana program. Selain itu, model implementasi CIPOO juga menjadi metode yang efektif dikarenakan bersifat mendasar, menyeluruh, dan terpadu dalam menilai implementasi program. Berikut bentuk kerangka kerja konseptual menggunakan pendekatan CIPOO (context, input, process, output, dan outcome)

1. *Context* (Konteks)

Pada hakekatnya, implementasi konteks berfokus kepada identifikasi mengenai kondisi sosial dimana program pemberdayaan dilaksanakan. Selain itu, implementasi konteks bertujuan untuk mengetahui apakah organisasi telah memprioritaskan kebutuhan-kebutuhan dari pihak yang menjadi sasaran program.

## 2. *Input* (Masukan)

Implementasi input digunakan untuk menjawab pertanyaan bagaimana dengan sumber daya yang dimiliki seperti sumber daya alam manusia dan modal sosial perusahaan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Menurut Sulistyani yang dikutip dalam Aziz (2017), dalam implementasi input diperlukan input berupa potensi internal seperti pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki penyelenggara program dalam memetakan kebutuhan masyarakat, dan potensi eksternal seperti modal sosial yang menjadi kekhasan masyarakat setempat dan bentuk kerjasama dengan stakeholder. Proses implementasi input bisa diketahui dengan cara melihat jumlah sumber daya manusia yang berpartisipasi serta dukungan sarana dan prasarana yang diberikan (Muyana, 2017)

## 3. *Process* (Proses)

Tujuan utama dari dimensi proses adalah untuk mengetahui bagaimana jalannya program apakah sudah sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan atau tidak. Selain itu, dimensi proses juga berupaya mengetahui tantangan dan hambatan yang dialami oleh perusahaan maupun penerima program sewaktu melaksanakan program. Adanya pemahaman terhadap proses memungkinkan terjadinya proses pengoreksian sehingga bisa mengawal program sesuai dengan ketentuan atau memutuskan untuk memberhentikannya.

## 4. *Output* (Luaran)

Output merupakan hasil konkret dari program yang telah dilaksanakan. Fokus pada dimensi output terletak pada apa yang telah dihasilkan oleh program, baik dalam produk ataupun layanan yang diberikan. Output biasanya terkait dengan hasil jangka pendek dan dapat diukur secara langsung setelah program dilaksanakan.

## 5. *Outcome* (Hasil)

Outcome merupakan dampak atau hasil jangka panjang dari implementasi program. Fokus pada dimensi outcome adalah perubahan lebih luas yang diharapkan terjadi sebagai akibat dari program. Sifatnya yang abstrak membuatnya sulit diukur secara langsung.

Dalam penelitian ini, model implementasi CIPOO digunakan untuk memahami implementasi program CSR yang dilaksanakan oleh PT RAPP dalam upaya perusahaan menangani stunting di desa Lukit. Adapun kontekstualisasi model implementasi CIPOO dalam penelitian ini dilakukan dengan cara membahas implementasi program CSR stunting dan mengkerangkainya dalam pendekatan model implementasi CIPOO. Setiap aspek dalam model ini berinteraksi dan saling memengaruhi dalam mencapai tujuan program untuk menanggulangi stunting. Berikut penjelasan tiap aspeknya :

### 1. Aspek konteks

- Analisis kebutuhan : kondisi stunting dan masalah sanitasi lainnya
- Kesesuaian program dengan kebijakan stunting level lokal

### 2. Aspek input

- Keterlibatan lintas aktor dalam penyusunan program
- Adanya asesmen untuk mengetahui kebutuhan masyarakat
- Adanya unsur kekhasan lokal dalam program
- Manfaat yang didapatkan oleh penerima program

### 3. Aspek Proses

- Tingkat penerimaan program oleh masyarakat dan stakeholder
- Hambatan implementasi program dan solusinya
- Adanya monitoring dan evaluasi program

### 4. Aspek Output

- Tingkat kepuasan masyarakat dan stakeholder
- Penurunan kasus stunting di desa Lukit

### 5. Dimensi Outcome

- Perubahan perilaku dan pengetahuan masyarakat